

# ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2013-2016

Amiroh Rosyidah<sup>1</sup>, Tatas Ridho Nugroho<sup>2</sup>, Toto Heru Dwihandoko<sup>3</sup>

Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Majapahit

Email: [amirohrosyidah3@gmail.com](mailto:amirohrosyidah3@gmail.com)

## *Abstract*

*Assessment of financial performance and financial capacity of local governments is very important to be carried out in order to find out developments in regional financial control every year. This study aims to assess the financial performance and financial capability of the Malang city government using financial ratio analysis of the 2013-2016 APBD. This type of research is quantitative description using secondary data obtained from BPKAD Malang City. The results showed that the financial performance of Malang City from 2013-2016 experienced a good increase with an average level of financial independence 31.02%, regional tax effectiveness 115.39%, expenditure allocation still prioritized on routine expenditure with an average rate of 77, 17% and spending experienced volatile growth. Malang's performance ability experienced a positive tendency, but was still in the poor category with an average DOF ratio of 25.84% and IKR of 29.38%.*

**Keywords:** *Financial Performance, Financial Capability, APBD*

## *Abstrak*

Penilaian kinerja keuangan dan kemampuan keuangan pada pemerintah daerah sangat penting sekali dilakukan guna mengetahui perkembangan dalam pengendalian keuangan daerah setiap tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja keuangan dan kemampuan keuangan pada pemerintahan daerah kota Malang dengan memakai analisis rasio keuangan terhadap APBD tahun 2013-2016. Jenis penelitian ialah deskripsi kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPKAD Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan kota Malang dari tahun 2013-2016 mengalami peningkatan yang baik dengan rata-rata tingkat kemandirian keuangan 31,02%, efektivitas pajak daerah 115,39%, alokasi belanja masih diprioritaskan pada belanja rutin dengan tingkat rata-rata 77,17% dan belanja mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif. Kemampuan kinerja kota Malang mengalami kecenderungan yang positif, namun masih berada dalam kategori kurang mampu dengan tingkat rata-rata rasio DOF 25,84% dan IKR 29,38%.

**Kata Kunci:** *Kinerja Keuangan, Kemampuan Keuangan, APBD*

## A. PENDAHULUAN

Peran aktif pemerintah daerah ketika mengatur daerahnya sendiri, merupakan tantangan yang harus diterima oleh pemerintah agar dapat membangun dan mengelola daerah masing-masing dengan baik. Sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

menjelaskan otonomi daerah ialah wewenang, kewajiban, dan hak daerah otonom untuk mengelola sendiri urusan pemerintah serta keperluan masyarakat setempat dalam sistem NKRI.

Pelimpahan wewenang pembangunan melalui pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya keuangan. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah menyelenggarakan persoalan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya pemberian wewenang kepada Pemerintah Daerah diwajibkan untuk dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dari perangkat daerah tersebut. Dengan demikian, perlu dilakukan pengukuran kinerja terhadap pemerintah daerah tersebut.

Pemerintah daerah yang menjadi pihak untuk menjalankan tugas pemerintah, pelayanan, dan pembangunan terhadap masyarakat wajib untuk menyerahkan atau melaporkan pertanggungjawaban daerahnya untuk dilihat dan dinilai, apakah pemerintah daerah telah mengelola keuangan daerah dengan baik atau kurang baik. Analisis rasio merupakan alat yang dipakai dalam menganalisis kinerja keuangan suatu daerah.

Kemampuan keuangan sangat penting untuk penyelenggaraan suatu pemerintah, karena pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya secara efisien dan efektif tanpa kurangnya biaya guna memberikan pelayanan pembangunan dan keuangan. Ini adalah salah satu dasar kriteria guna mengetahui jajaran nyata terhadap kemampuan daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. APBD menuangkan kemampuan keuangan daerah untuk mengelola keuangannya serta menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam pembiayaan kegiatan pelaksanaan tugas pembantuan. Pemerintah daerah seharusnya mampu memberi biaya untuk semua kegiatan pembangunan, kemasyarakatan, dan pemerintahan sebagai pelaksanaan pengurusan dan pengaturan rumah tangganya sendiri. Untuk melakukan otonomi daerah,

pemerintah daerah dituntut untuk bisa menjalankan roda pemerintahan secara efektif serta efisien, bisa mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan keadilan dan pemerataan dengan mengembangkan semua potensi yang sudah dimiliki oleh masing-masing daerah.

Pendanaan yang dituangkan sebagai bentuk pendapatan, biaya dan pembiayaan daerah sangat diperlukan sebagai penyelenggaraan pemerintah daerah. Sehingga, sangat perlu diolah dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pelaksanaan, pelaporan pertanggungjawaban, penatausahaan, pengawasan, dan perencanaan keuangan. Dibutuhkannya sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik sebagai rangka mengelola dana APBD secara akuntabel, transparan, efektif, dan efisien. Berkaitan dengan hal tersebut, analisis kinerja keuangan dan kemampuan keuangan pada pemerintah daerah pemerintah Kota Malang merupakan informasi yang sangat penting guna membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah serta menilai apakah pemerintah daerah di kota Malang telah berhasil mengelola keuangannya secara baik dan memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Indikator kinerja keuangan daerah bisa dijadikan evaluasi sebagai pembanding skema kerja serta pelaksanaannya. Selain itu, juga bisa digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode tertentu.

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti ingin melakukan analisis tentang kinerja keuangan dan kemampuan keuangan pada pemerintah daerah Kota Malang, dengan judul Analisis Kinerja Keuangan dan Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang Tahun 2013-2016.

## **B. KAJIAN LITERATUR**

### **1. Otonomi Daerah**

Menurut pasal 1 UU No. 32 Tahun 2004, otonomi daerah yakni kewajiban, hak, dan wewenang daerah otonom guna mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat setempat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud daerah otonom yakni kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan serta

kepentingan masyarakat setempat menurut inisiatif sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI.

## 2. Keuangan Daerah

Keuangan Daerah merupakan semua kewajiban dan hak daerah sebagai langkah penyelenggaraan pemerintah daerah yang bisa di nilai dengan termasuk di dalamnya sebagai wujud kekayaan yang berhubungan antara hak serta kewajiban daerah tersebut, sebagai kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah (pasal 1 ayat 5 PP No.58 Tahun 2005 dalam Halim, 2007).

## 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Wiratna (2015:60), menjelaskan bahwa APBD merupakan rencana keuangan yang dibuat pemerintah daerah yang sudah disetujui dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

## 4. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan ialah tingkat pencapaian suatu target aktivitas/kegiatan keuangan pemerintah daerah yang sudah diukur melalui indikator-indikator keuangan yang bisa dinilai melalui hasil pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Menurut Mardiasmo (2002:121), menjelaskan bahwa pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan antara lain : membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, memperbaiki kinerja pemerintah, serta memperbaiki komunikasi kelembagaan dan mewujudkan pertanggung-jawaban publik. Ada beberapa analisis rasio untuk pengukuran kinerja keuangan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD seperti:

### a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan kepada masyarakat yang sudah membayar pajak serta retribusi sebagai sumber pendapatan yang dibutuhkan daerah (Mahmudi, 2007: 128). Kemandirian daerah dilihatkan berdasarkan besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan total bantuan daerah serta pinjaman.

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat+Provinsi+Pinjaman}} \times 100\%$$

Menurut Purba (2012), untuk mengetahui hubungan situasional pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, terdapat empat pola hubungan seperti yang ditunjukkan pada table dibawah ini:

**Tabel 1 : Pola Hubungan Kemandirian terhadap Kemampuan Keuangan Daerah**

| Kemampuan Keuangan | Rasio Kemandirian % | Pola Hubungan |
|--------------------|---------------------|---------------|
| Rendah Sekali      | ≤ 25                | Instruktif    |
| Rendah             | 25-50               | Konsultatif   |
| Sedang             | 50-75               | Partisipatif  |
| Tinggi             | ≥ 75                | Delegatif     |

Sumber : Purba (2012)

### b. Rasio Efektivitas Pajak Daerah (REPD)

Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan seluruh sumber PAD sesuai dengan jumlah pajak daerah yang telah ditargetkan. Menurut Mahsun (2006:187), rasio ini diukur melalui perbandingan:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 2 : Tingkat Efektivitas Pajak Daerah**

| <b>Efektivitas Keuangan Daerah</b> | <b>Rasio Efektivitas</b> |
|------------------------------------|--------------------------|
| Sangat Efektif                     | >100%                    |
| Efektif                            | 100%                     |
| Cukup Efektif                      | 90-99%                   |
| Kurang Efektif                     | 75-89%                   |
| Tidak Efektif                      | <75%                     |

*Sumber : Mahmudi (2010:143)*

c. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas/keserasian ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya terhadap belanja operasi serta belanja modal secara optimal. Jika semakin tinggi persentase belanja modal untuk sarana serta prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Formula pengukuran rasio ini diformulasikan seperti :

$$\text{Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

d. Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*)

Menurut Halim (2008:241), rasio pertumbuhan (*growth ratio*) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah guna mempertahankan serta meningkatkan keberhasilannya yang sudah dicapai dari periode menuju periode berikutnya.

Pengukuran tingkat pertumbuhan pendapatan daerah dihitung menggunakan formula :

$$\text{Pertumbuhan PAD} = \frac{(\text{PAD}_t - \text{PAD}_{t-1})}{\text{PAD}_{t-1}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan TPD} = \frac{(\text{TPT}_t - \text{TPT}_{t-1})}{\text{TPT}_{t-1}} \times 100\%$$

Pengukuran tingkat pengeluaran daerah dapat diketahui melalui formula :

$$\text{Pertumbuhan Belanja Operasional} = \frac{(\text{BOT}_t - \text{BOT}_{t-1})}{\text{BOT}_{t-1}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Belanja Modal} = \frac{(\text{BMT}_t - \text{BMT}_{t-1})}{\text{BMT}_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana :

t = Tahun Berjalan

t-1 = Tahun Sebelumnya

## 5. Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah

Kemampuan keuangan daerah merupakan kemampuan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya sendiri. Menurut Munir dkk (2004:105), menjelaskan ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah, yang artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan serta kemampuan guna menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola serta menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

Pengukuran kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari rasio derajat otonomi fiskal (DOF) serta dapat dilihat dari rasio indeks kemampuan rutin (IKR). Menurut Reksohadiprodjo (2000) dalam Munir dkk (2004:106), derajat otonomi fiskal bisa diukur dengan melihat perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah:

$$DOF = \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

Melalui perspektif pembiayaan daerah, kemampuan keuangan daerah tercermin pada Indeks Kemampuan Rutin (IKR). Radianto (1997) (dalam Munir dkk (2004:159)) menjelaskan indeks kemampuan rutin merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana kemampuan pendapatan asli daerah suatu daerah bisa membiayai rutinnnya. IKR diketahui dengan menghitung:

$$IKR = \frac{PAD}{\text{Total Belanja Rutin}} \times 100\%$$

Tolak ukur kemampuan keuangan daerah dijelaskan dalam skala interval DOF dan IKR :

**Tabel 3 : Kategori Kemampuan Daerah**

| <b>PAD/TPD (%)</b> | <b>Kemampuan Keuangan</b> | <b>IKR (%)</b> |
|--------------------|---------------------------|----------------|
| 0,00-10,00         | Sangat Kurang             | 0,00-10,00     |
| 10,01-20,00        | Kurang                    | 10,01-20,00    |
| 20,01-30,00        | Sedang                    | 20,01-30,00    |
| 30,01-40,00        | Cukup                     | 30,01-40,00    |
| 40,01-50,00        | Baik                      | 40,01-50,00    |
| >50,01             | Sangat Baik               | >50,01         |

*Sumber : Munir, dkk (2004)*

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang didapat guna memecahkan masalah yang telah ada sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan serta kemampuan keuangan pemerintah Kota Malang apabila dihitung menggunakan rasio keuangan.

Jenis data pada penelitian ini ialah data sekunder, menggunakan data deret berkala (*time series*), atau runtut waktu selama empat tahun yakni dari tahun 2013-2016. Data sekunder ini diperoleh dari instansi pemerintah diantaranya sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran Pemerintah Kota Malang tahun 2013-2016, bersumber dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang yang dipublikasikan.
2. Gambaran umum kota Malang, bersumber dari BPS Kota Malang.

Penelitian ini dilakukan kepada pemerintah daerah kota Malang dengan mengambil data laporan realisasi anggaran yang dipublikasikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Malang.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Analisis Kinerja Keuangan**

###### **a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)**

**Tabel 4 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Malang Tahun 2013-2016**

| <b>Tahun</b> | <b>Pendapatan Asli Daerah (Rp)</b> | <b>Transfer+Provinsi+ Pinjaman (Rp)</b> | <b>RKKD (%)</b> |
|--------------|------------------------------------|---|-----------------|
| 2013         | 317.850.423.684,26                 | 1.164.375.000.745,00                    | 27,30%          |
| 2014         | 372.550.096.292,03                 | 1.329.108.236.363,00                    | 28,03%          |
| 2015         | 424.938.755.525,02                 | 1.389.352.934.193,00                    | 30,58%          |
| 2016         | 477.332.655.844,88                 | 1.251.246.694.245,00                    | 38,15%          |
| Rata-rata    | 398.167.982.836,55                 | 1.283.520.716.386,50                    | 31,02%          |

*Sumber: Data diolah*

Tabel diatas menunjukkan peningkatan rasio kemandirian dari tahun ke tahun. Rasio tahun 2013 sebesar 27,30% dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2016 meningkat menjadi 38,15%. Meskipun terjadi peningkatan pada rasio kemandirian keuangan, hal tersebut masih belum bisa dikatakan bahwa pemerintah daerah telah mandiri dalam keuangannya. Karena tingkat rata-rata rasio kemandirian keuangan menunjukkan persentase 31,02%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah masih rendah dan memiliki pola hubungan konsultatif. Hal ini berarti pemerintah daerah belum cukup mampu untuk mendanai sendiri kegiatan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat, namun pengarah dan campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang yang berarti bahwa pemerintah daerah dinilai memiliki kemampuan yang meningkat dan sedikit demi sedikit telah mampu untuk menyelenggarakan urusan otonomi daerah.

###### **b. Rasio Efektifitas Pajak Daerah**

**Tabel 5 Rasio Efektifitas Pajak Daerah Pemerintahan Daerah di Kota Malang Tahun 2013-2016**

| <b>Tahun</b> | <b>Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp)</b> | <b>Target Penerimaan Pajak Daerah (Rp)</b> | <b>Rasio Efektifitas Pajak Daerah (%)</b> |
|--------------|---|--|---|
| 2013         | 238.499.748.161,57                            | 210.287.899.778,18                         | 113,42%                                   |
| 2014         | 278.885.189.548,87                            | 260.000.000.000,00                         | 107,26%                                   |
| 2015         | 316.682.891.173,76                            | 272.000.000.000,00                         | 116,43%                                   |
| 2016         | 374.641.673.419,65                            | 301.000.000.000,00                         | 124,46%                                   |

|           |                    |                    |         |
|-----------|--------------------|--------------------|---------|
| Rata-rata | 302.177.375.575,96 | 260.821.974.944,55 | 115,39% |
|-----------|--------------------|--------------------|---------|

*Sumber: Data diolah*

Rasio efektifitas pajak daerah menunjukkan perubahan yang berfluktuasi selama 4 tahun. Rasio paling efektif terjadi pada tahun 2016 dengan persentase 124,46%. Sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2014 dengan persentase 107,26%. Rata-rata rasio efektifitas pajak daerah sebesar 115,39%, hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut telah merealisasikan target pajak daerah dengan sangat baik. Pemerintah daerah kota Malang memiliki kinerja yang sangat baik dalam merealisasikan target pajak daerah. Hal tersebut terlihat dari setiap tahun rasio efektifitas tergolong dalam kategori yang sangat efektif.

c. Rasio Aktivitas

**Tabel 6 Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Pemerintah Daerah di Kota Malang Tahun 2013-2016**

| Tahun     | Total Belanja Operasi (Rp) | Total Belanja (Rp)   | Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja (%) |
|-----------|----------------------------|----------------------|--|
| 2013      | 1.133.013.596.006,45       | 1.486.368.766.886,45 | 76,23%   |
| 2014      | 1.284.446.205.759,14       | 1.602.999.850.132,14 | 80,13%   |
| 2015      | 1.465.040.706.749,93       | 1.803.345.504.318,29 | 81,24%   |
| 2016      | 1.515.860.633.361,67       | 2.132.344.361.610,28 | 71,09%   |
| Rata-rata | 1.349.590.285.469,30       | 1.756.264.620.736,79 | 77,17%   |

*Sumber: Data diolah*

Rasio aktivitas yang ditunjukkan pada tabel diatas menunjukkan persentase rata-rata tingkat belanja operasi terhadap total belanja sebesar 77,17%. Rasio belanja operasi terhadap total belanja paling tinggi terjadi pada tahun 2015 dengan persentase 81,24%, dan rasio belanja operasi terhadap total belanja paling rendah terjadi pada tahun 2016 dengan persentase 71,09%.

**Tabel 7 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Pemerintah Kota Malang Tahun 2013-2016**

| Tahun     | Total Belanja Modal (Rp) | Total Belanja (Rp)   | Rasio Belanja Pembangunan terhadap Total Belanja (%) |
|-----------|--------------------------|----------------------|--|
| 2013      | 353.264.833.758,00       | 1.486.368.766.866,45 | 23,77%   |
| 2014      | 318.462.052.422,00       | 1.602.999.850.132,14 | 19,87%   |
| 2015      | 337.647.558.967,36       | 1.803.345.504.318,29 | 18,74%   |
| 2016      | 396.116.084.374,77       | 2.132.344.361.610,28 | 18,57%   |
| Rata-rata | 351.372.632.380,53       | 1.756.264.620.731,79 | 20,24%   |

*Sumber: Data diolah*



Sedangkan tabel 7 menunjukkan tingkat rata-rata belanja modal terhadap total belanja sebesar 20,24%. Tingkat belanja modal terhadap total belanja terbesar ialah tahun 2013 dengan persentase 23,77%, dan tahun berikutnya mengalami penurunan persentase hingga pada tahun 2016 yaitu 18,57%. Dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2013-2016 memperlihatkan bahwa sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah kota Malang masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja rutin/belanja operasi dengan tingkat rata-ratanya 77,17%.

d. Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*)

**Tabel 8 Rasio Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Kota Malang Tahun 2013-2016**

| Tahun            | Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah | Pertumbuhan Pendapatan | Pertumbuhan Belanja Operasi | Pertumbuhan Belanja Modal |
|------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>2013</b>      | -                                  | -                      | -                           | -                         |
| <b>2014</b>      | 17,21%                             | 15,74%                 | 13,37%                      | -9,85%                    |
| <b>2015</b>      | 14,06%                             | 3,64%                  | 14,06%                      | 6,02%                     |
| <b>2016</b>      | 12,33%                             | -4,81%                 | 3,47%                       | 17,32%                    |
| <b>Rata-rata</b> | 14,30%                             | 4,23%                  | 9,86%                       | 4,25%                     |

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah diolah, kondisi pertumbuhan PAD dan pertumbuhan pendapatan selalu mengalami penurunan dari tahun 2014-2016. Hal ini dapat dilihat penurunan rasio pertumbuhan PAD tahun 2014 mencapai 17,21% tetapi pada tahun 2015 mencapai 14,06% dan tahun 2016 semakin menurun.

Pertumbuhan belanja operasi mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi dan secara keseluruhan pertumbuhan belanja operasi mengalami pertumbuhan yang positif dengan rata-rata 9,86%. Pertumbuhan belanja modal juga mengalami pertumbuhan yang positif dengan rata-rata 4,25%.

**2. Analisis Kemampuan Keuangan**

a. Rasio DOF

**Tabel 9 Rasio DOF Pemerintah Daerah di Kota Malang Tahun 2013-2016**

| Tahun            | Pendapatan Asli Daerah (Rp) | Total Pendapatan (Rp) | Rasio DOF (%) |
|------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>2013</b>      | 317.850.423.684,26          | 1.524.846.569.429,26  | 20,85%        |
| <b>2014</b>      | 372.550.096.292,03          | 1.764.869.389.655,03  | 21,11%        |
| <b>2015</b>      | 424.938.755.525,02          | 1.829.072.689.718,02  | 23,23%        |
| <b>2016</b>      | 477.332.655.844,88          | 1.251.246.694.245,00  | 38,15%        |
| <b>Rata-rata</b> | 398.167.982.836,55          | 1.592.508.835.761,83  | 25,84%        |

Sumber: Data diolah

Tabel 9 menunjukkan derajat otonomi fiskal kota Malang pada tahun 2013-2016 yang mengalami peningkatan. Walaupun dengan rata-rata derajat otonomi fiskal selama 4 tahun

tersebut adalah 25,84% yang berarti masuk dalam kategori sedang. Tingkat rasio yang paling kecil adalah tahun 2013 yaitu 20,85%, sedangkan persentase derajat otonomi fiskal paling besar adalah tahun 2016 yaitu 38,15%.

Rasio DOF pada pemerintah daerah di kota Malang tahun 2013-2016, menunjukkan perubahan yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun berikutnya. Peningkatan derajat otonomi fiskal dari tahun 2013-2016 merupakan dampak dari meningkatnya pendapatan pajak daerah dan pendapatan retribusi daerah dari tahun ke tahun. Meningkatnya derajat otonomi fiskal dari tahun ke tahun tidak menjadikan pemerintah daerah kota Malang termasuk dalam mampu menyelenggarakan desentralisasi. Hal tersebut dikarenakan rata-rata derajat otonomi fiskal dari tahun 2013-2016 masih dalam kategori sedang, ini berarti pemerintah daerah belum mampu untuk menyelenggarakan desentralisasi dengan mengoptimalkan potensi daerah (PAD) untuk menyelenggarakan pelayanan umum kepada masyarakat yang lebih baik.

b. Indeks Kemampuan Rutin

**Tabel 10 Indeks Kemampuan Rutin Pemerintah Daerah di Kota Malang Tahun 2013-2016**

| Tahun     | Pendapatan Asli Daerah (Rp) | Total Belanja Rutin (Rp) | Indeks Kemampuan Rutin (%) |
|-----------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 2013      | 317.850.423.684,26          | 1.133.013.596.006,45     | 28,05%                     |
| 2014      | 372.550.096.292,03          | 1.284.446.205.759,14     | 29,00%                     |
| 2015      | 424.938.755.525,02          | 1.465.040.706.749,93     | 29,00%                     |
| 2016      | 477.332.655.844,88          | 1.515.860.633.361,67     | 31,48%                     |
| Rata-rata | 398.167.982.836,55          | 1.349.590.285.469,30     | 29,38%                     |

*Sumber: Data diolah*

Tabel 10 menunjukkan rata-rata indeks kemampuan rutin tahun 2013-2016 sebesar 29,38% yang berarti masuk dalam kategori sedang. Tingkat rasio yang paling kecil terlihat pada tahun 2013 yaitu 28,05%, sedangkan pada tahun 2014 dan tahun 2015 sebesar 29,00% dimana tingkat rasio tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dan pada tahun 2016 sudah mengalami kenaikan tingkat rasio sebesar 31,48%.

Indeks kemampuan rutin pemerintah daerah di kota Malang tahun 2013-2014, menunjukkan perubahan yang selalu mengalami kenaikan atau peningkatan. Peningkatan indeks kemampuan rutin dari tahun 2013-2016 merupakan dampak dari meningkatnya belanja rutin dari tahun ke tahun. Meningkatnya indeks kemampuan rutin dari tahun ke tahun tidak menjadikan daerah pemerintah kota Malang termasuk dalam pendapatan asli daerah mampu membiayai belanja rutinnya. Hal tersebut dikarenakan rata-rata indeks kemampuan rutin dari tahun 2013-2016 masih dalam kategori sedang, ini berarti pemerintah daerah masih kurang mampu untuk membiayai belanja rutin dengan mengoptimalkan potensi daerah (PAD) untuk menyelenggarakan sektor publik yang lebih baik.

**E. KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil analisis data yang sudah dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan atas kinerja keuangan dan kemampuan keuangan, maka bisa ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

- a. Rasio kemandirian keuangan daerah dari tahun 2013-2016 menunjukkan hasil yang masih rendah dan memiliki pola hubungan konsultatif.

- b. Rasio efektivitas pajak daerah dari tahun 2013-2016 menunjukkan hasil yang sangat efektif dalam mengumpulkan pajak daerah.
- c. Rasio aktivitas dari tahun 2013-2016 menunjukkan hasil bahwa belanja pemerintahan daerah kota Malang pengalokasiannya lebih didominasi oleh belanja rutin/belanja operasi.
- d. Rasio pertumbuhan dari tahun 2013-2016 menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan pendapatan asli daerah mengalami penurunan pada tahun 2013 hingga tahun 2016. Rasio pertumbuhan belanja tahun 2013-2016 menunjukkan hasil bahwa pemerintah daerah di kota Malang mengalami pertumbuhan yang positif.
- e. Rasio derajat otonomi fiskal dari tahun 2013-2016 menunjukkan hasil yang masih dalam kategori sedang.
- f. Indeks kemampuan rutin dari tahun 2013-2016 menunjukkan hasil yang masih dalam kategori sedang.

Adapun saran bagi Pemerintah Daerah di Kota Malang yaitu pemerintah kota Malang harus lebih meningkatkan pengelolaan terhadap potensi yang telah dimiliki kota Malang. Potensi tersebut seperti bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, budaya, hingga perdagangan. Apabila pemerintah berhasil memaksimalkan pemanfaatan potensi tersebut secara maksimal, maka pendapatan asli daerah akan semakin meningkat, serta perlunya upaya untuk melakukan efisiensi belanja daerah, karena perolehan PAD sangat kecil apabila dibandingkan dengan alokasi belanja daerah.

## F. REFERENSI

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta, Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2009. *Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah: Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah*. Yogyakarta, Sekolah Pascasarjana UGM.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta, ANDI.
- Munir, Dasril, Tangkilisan. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta, YPAPI.
- Rahmayati, Anim. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013". *Jurnal EKA CIDA* Vol. 1 Maret 2016. <http://journal.amikomsolo.ac.id/index.php/ekacida/article/viewFile/9/12>
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Alfabeta.
- Suwarjeni, V.Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Yigibalom, Didi, dan Ida Ayu Purba Riani. 2016. “*A Performance Analysis of Regional Budget of Jayawijaya Regency From 2010 to 2014*”. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol.1 No.3. <http://ejournal.mkduncen.ac.id/index.php/keuda/article/view/12>  
<http://www.dosenpendidikan.com/tujuan-dan-manfaat-otonomi-daerah-lengkap/>